



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 19
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 19 Juni 2024
Waktu : Pukul 11.15 WIB s.d. 13.09 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H., M.H. (F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII
Acara : 1. Penetapan Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN Tahun 2025
2. Penetapan RKA K/L dan RKP Tahun 2025
Hadir : 23 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

1. FRAKSI PDI PERJUANGAN:

6 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.

3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
6. Ribka Tjiptaning Ploretariyati

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

4 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. Mukhtarudin
2. Bambang Hermanto, S.E.
3. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
4. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. Dr. Ramson Siagian

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono
2. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang anggota dari 3 anggota:

-

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

-

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDM RI)
2. Dandan Kusdiana (Sekjen Kementerian ESDM RI)

3. Bambang Suswanto (Irjen Kementerian ESDM RI)
4. Dwi Soetjipto (Ka. SKK Migas)
5. Erika Retnowati (Ka. BPH Migas)
6. Alfian Nusution (Dir. Pertamina)
7. Djoko Siswanto (Sekjen DEN)
8. Teuku M Faisal (Kepala BPMA)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Izin Pak Ketua, bisa kita mulai Pak Ketua?

Ibu-Bapak, bisa kita mulai? Ibu-Bapak Anggota Komisi VII.

Pak Menteri, kita mulai ya?

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam sehat untuk kita semua.*

Yang kami hormati, Pimpinan Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati, Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati, Menteri ESDM beserta jajarannya,
Serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, mari kita ucap, ucapkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dalam melaksanakan rapat kerja bersama Menteri ESDM RI.

Pada kesempatan ini, kami juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI serta Menteri ESDM RI beserta seluruh jajarannya.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan ke-V Tahun Sidang 2023-2024, maka pada hari ini, Komisi VII DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri ESDM RI dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, dengan agenda:

1. Pembahasan asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025.
2. Penetapan RKA-KL Kementerian ESDM RI tahun 2025.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 15 anggota dari 7 fraksi yang ada, dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan dari rapat-rapat di DPR bahwa setiap rapat dinyatakan terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, Pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat kerja ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan bersifat terbuka.

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI dinyatakan terbuka untuk umum dan dibuka secara resmi.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.15 WIB)**

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami mintakan persetujuan Ibu-Bapak anggota bahwa rapatnya selesai pada pukul kurang lebih 13 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Apa dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Ibu-Bapak yang kami hormati,

Kebijakan sektor ESDM, baik itu dari asumsi dasar serta dalam Rapat Kerja, Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2025, harus dapat mendorong perekonomian menjadi lebih cepat serta berpihak kepada rakyat. Dan sesuai dengan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI pada tanggal 5 Juni 2024, maka pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melanjutkan pendalaman terkait asumsi dasar sektor ESDM RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan dilanjutkan dengan penetapan.

Silakan, sekretariat menampilkan pada layar usulan yang disampaikan.

Ini adalah yang usulan disampaikan sesuai dengan rapat kerja kita dua minggu yang lalu.

Ibu-Bapak yang kami hormati,

Untuk efektivitas waktu, pimpinan meminta persetujuan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI agar kita tuntaskan agenda pertama, yaitu pembahasan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2025, dilanjutkan dengan penetapan. Setelah itu baru kita masuk ke dalam agenda selanjutnya, yaitu penetapan RKA-KL Kementerian ESDM RI Tahun 2025.

Apakah dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Kami persilakan Menteri ESDM RI untuk menyampaikan pemaparannya terkait asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025. Kami persilakan.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati, Bapak-Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,
Para pejabat Kementerian ESDM, Sekjen DEN, Kepala BPH Migas, Kepala SKK, Kepala BPMA, Direksi Pertamina, dan Direksi PT PLN yang mewakili, serta
Hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi, yaitu rapat kerja dengan agenda penetapan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN tahun 2025 dan penetapan RKA-KL dan RKP Tahun 2025.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,

Menindaklanjuti rapat kerja tanggal 5 Juni bahwa Komisi VII akan melakukan pendalaman sebelum dilakukan penetapan, maka secara ringkas Kementerian ESDM kembali mengusulkan asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2025 sebelum dilakukannya penetapan. Untuk ICP, ini asumsi kami adalah sebesar antara 75 sampai 85 US *dollar per barrel*. Hal ini didasari atas realisasi rata-rata ICP sampai dengan Mei 2024 dengan hasil adalah rata-rata sebesar 81,67 dolar per *barrel* dan kecenderungannya masih turun naik. Serta juga didasarkan pada proyeksi *polling reuters* dan *short term energy outlook* dari United States Energy Information Administration, Department of Energy, harga minyak dunia tahun 2025 diperkirakan ada pada kisaran 80,46 sampai 87,79 dolar per *barrel*. Menurut pemantauan kami, harga minyak dunia masih ada pada kisaran level antara 80 sampai 85 US *dollar per barrel*.

Kemudian *lifting* minyak dan gas bumi. *Lifting* minyak dan gas bumi diusulkan sebesar 1.000, 1,58 sampai 1,648 juta *barrel oil equivalent per day*, yang terdiri dari minyak bumi sebesar 580.000 kemudian sampai dengan dengan 601.000 *barrel oil per day*, dan gas bumi sebesar 1.003.000 *barrel oil equivalent* sampai dengan 1.047.000 *barrel oil equivalent*. Pada beberapa tahun terakhir, produksi minyak, migas terutama minyak terus menurun baik secara alamiah maupun yang disebabkan oleh *unplanned shutdown* di

beberapa lapangan yang mengakibatkan adanya *loss of production*, yang sampai dengan Mei 2024 sudah mengurangi kurang lebih 172 *million SCF* dan 5.825 *barrel oil per day*. Sebagai antisipasi penurunan tersebut, SKK telah mendorong K3S untuk melakukan kegiatan *drilling* yang telah mencapai 950.

Disamping itu, terdapat empat strategi utama untuk *meningkatkan* produksi atau *lifting* melalui strategi *improving existing asset value*, yaitu melalui peningkatan kegiatan pengeboran, pengembangan, dan reaktivasi sumur-sumur yang *idle*. Kemudian transformasi daripada sumber untuk berproduksi, melalui proses percepatan POD serta percepatan *on stream* proyek-proyek Hulu Migas. *Enhanced oil recovery* dan *waterflood* melalui percepatan proyek EOR seperti di Minas, serta *exploration* untuk *giant discovery* dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi di *offshore* serta di laut dalam dan di Indonesia bagian timur.

Masih terdapat beberapa lapangan minyak dan gas bumi yang akan *on stream* pada tahun 2029, seperti ande-ande lumut yang akan berproduksi kuartal pertama 2028, kemudian singa laut, kuda laut *on stream* 2026 di Natuna dan Sumur Hidayah yang *on stream* di kuartal I 2027 dilepas Pantai Aru di, di Hidayah di Madura untuk minyak bumi, serta Masela yang akan *on stream* di awal tahun 2030 lepas Pantai Aru. Serta sumber gas di Asap Kido Merah yang akan *on stream* di kuartal IV 2025 di Papua dan Geng North di Selat Makassar yang akan *on stream* pada tahun 2027 untuk gas bumi.

Cost recovery, memperhatikan realisasi *cost recovery* hingga bulan Mei 2024 sebesar 2,51 miliar US *dollar* atau 30% dari target APBN sebesar 8,25 miliar US *dollar*. Sedangkan *outlook* tahun 2024 sebesar 8,26 miliar US *dollar* atau lebih rendah dari asumsi APBN 2024 sebesar 8,25 miliar dikarenakan terdapat efisiensi kegiatan, di antaranya seismik, pemboran, dan biaya administrasi. Untuk itu pada RAPBN Tahun 2025, *cost recovery* yang kami usulkan adalah sebesar 8, US *dollar* 8,5 sampai dengan 8,7 miliar US *dollar*, dengan pertimbangan adanya penambahan kegiatan pengeboran untuk eksplorasi dan pengembangan, adanya kegiatan eksplorasi seismik dan *GnG*, serta beberapa *plan of development* optimalisasi lapangan yang *on stream*.

Kemudian mengenai BBM dan LPG bersubsidi, kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 18,84 sampai dengan 19,99 juta kiloliter, terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 sampai 0,55 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 18,33 sampai dengan 19,44 juta kiloliter. Arah kebijakan subsidi BBM adalah pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah serta melanjutkan *roadmap* registrasi konsumen pengguna BBM.

Kenaikan yang cukup tinggi pada volume BBM bersubsidi dibandingkan dengan *outlook* 2024 disebabkan oleh metode perhitungan regresi nonlinear untuk konsumsi BBM terhadap perkiraan PDB tahun 2025 dan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penyaluran BBM, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Selain, selain itu, pada tahun 2024 ini telah dilakukan penertiban penggunaan barcode pada program subsidi tepat.

Mencermati realisasi sampai dengan bulan Mei tahun 2024 dan *outlook* 2024, kami mengusulkan volume LPG 3 kilogram dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton. Arah kebijakan LPG yaitu melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, di antaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 kilogram berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan terkait peta jalan transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram, yaitu pertama tahapan transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram tepat sasaran telah dimulai dengan terbitnya Kepmen Nomor 37.K/MG.01/MEM.M tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang LPG tertentu tepat sasaran dan Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu tepat sasaran.

Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kilogram di sub-penyalur hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Pengguna yang belum terdata wajib mendaftar di sub-penyalur sebelum bertransaksi. Mulai 1 Maret 2023, dilaksanakan proses pendataan dan pencocokan data pengguna LPG tabung 3 kilogram ke dalam sistem berbasis web. Mulai 1 Juni 2024, seluruh pencatatan transaksi di sub-penyalur dilakukan melalui MAP (Merchant Apps Pertamina), kecuali untuk 689 sub-penyalur di daerah yang terkendali sinyal internet.

Transformasi tahap dua, yaitu pensasaran pengguna LPG tabung 3 kilogram baru akan diterapkan setelah diterbitkannya payung hukum terkait kriteria pengguna isi ulang LPG tahun, tabung 3 kilogram. Saat ini proses revisi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 masih menunggu persetujuan izin prakarsa dari presiden. Apabila revisi Peraturan Presiden tersebut termaksud ditetapkan pada triwulan IV 2024, maka pensasaran pengguna LPG tabung 3 kilogram dapat diimplementasikan pada tahun 2025 dan tahun selanjutnya. Selanjutnya, perubahan mekanisme subsidi LPG tabung kilogram menjadi berbasis orang atau penerima manfaat akan diterapkan pada tahun 2027.

Kemudian subsidi tetap minyak solar. Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025, kami mengusulkan subsidi tetap untuk minyak solar sebesar Rp1.000,- sampai Rp3.000,- per liter. Hal ini perlu dilakukan mengingat harga keekonomian minyak solar mencapai Rp12.100,- per liter, sedangkan harga jual eceran sebesar Rp6.800,- per liter. Minyak solar masih banyak digunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum, sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual minyak solar.

Kemudian kita masuk ke subsidi listrik. Subsidi listrik pada RAPBN 2025 diusulkan sebesar 83,02 sampai dengan 88,36 triliun dengan asumsi ICP 75 sampai 85 US *dollar* per *barrel* dan kurs pada kisaran 15.300 sampai dengan 16.000 rupiah per US *dollar*. Inflasi sebesar 1,5 sampai 3,5% sesuai dengan

KEM PPKF 2025 tanggal 6 Mei 2024, dan dengan asumsi tidak ada penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan subsidi. Kebijakan subsidi listrik tahun 2025, yaitu tepat sasaran diberikan hanya kepada golongan yang berhak, untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga yang miskin dan rentan serta mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati,

Demikian tadi telah kami sampaikan asumsi APBN di tahun 2025. Selanjutnya, kami mohonkan persetujuan dari Bapak-Ibu Komisi VII DPR RI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Menteri atas penyampaian dari penjelasannya.

Kami persilakan kepada Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI untuk bisa memberikan pandangan dan tanggapannya atas asumsi dasar yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri ESDM. Kalau bisa tolong ditampilkan saja, biar nanti kita bisa jadikan itu sebagai acuan kita untuk tanggapan yang disampaikan oleh teman-teman Anggota Komisi VII.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):

Pak Eddy

KETUA RAPAT:

Silakan, Pimpinan.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):

Sebelum kita membahas, kebetulan hari ini adalah hari bahagia untuk kita semuanya karena hari ini adalah hari ulang tahun Pak Menteri yang ke. Iya, yang ke-71 tepatnya 53 tahun, eh maaf, tahun 53 yang lalu Pak Menteri lahir dan kita semuanya bersyukur, kita doakan semoga beliaunya panjang umur, ya, sehat *wal 'afiat* terus-menerus, sukses apa yang dicita-citakan dan apa yang dikerjakan, dan bahagia lahir batin bersama keluarga

Terima kasih.

Terima kasih Pak Eddy, kembali

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Sekali lagi kami ucapkan selamat Pak Menteri, dan kepada teman-teman Anggota Komisi VII tolong pertanyaan yang sulit-sulit ditahan dulu untuk hari spesial ini.

Kami persilakan dari PDI Perjuangan. Silakan, Ibu Mercy.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Baik, terima kasih Pimpinan dan seluruh Kawan-Kawan Komisi VII, Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Hari ini kita akan melakukan penetapan, baik ICP sampai dengan subsidi listrik dan saya kira seluruh gumulan sudah kita lakukan. Atas nama Fraksi PDI Perjuangan, kami setuju dengan seluruh catatan-catatan perubahan yang kita bahas di dalam beberapa forum-forum sebelumnya.

Yang pertama, untuk ICP baik usulan RAPBN di angka 7, 75 sampai dengan 85 US *dollar per barrel*, usulan kami menjadi 80 sampai dengan 85, mempertimbangkan situasi geopolitik yang sementara terjadi, fluktuatifnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang pada akhirnya berdampak terhadap ICP kita juga, dengan tetap menggunakan WTI maupun Brent sebagai patokan sehingga kami setuju ada di angka 80 sampai 85.

Yang kedua untuk *lifting* migas, untuk *lifting* minyak bumi, usulan RAPBN 2025, 580 sampai dengan 601. *Exercise* sudah dilakukan cukup panjang baik dalam rapat RDP di level dirjen termasuk juga dengan Panja Migas dengan SKK Migas, Menteri, kemudian dilanjutkan dengan rapat dengan para K3S, kami sepakat ada di angka 600 sampai dengan 605. Kemudian untuk *lifting* gas bumi, kami sepakat ada di angka 1.003 sampai dengan 1.047 sesuai dengan usulan RAPBN 2025. Untuk *cost recovery*, usulan RAPBN 2025 ada di angka 8,5 sampai dengan 8,7. Usulan yang kami tawarkan adalah 8,25 sampai dengan 8,5 dengan catatan atau dengan pandangan sebagai berikut.

Pada saat kita menetapkan APBN tahun 2024, *cost recovery* kita ada di angka 825. Itu dengan angka *lifting* kita ada di sekitar 6,5 ya, sampai dengan batas atasnya 6,5 dan pencapaian hari ini kurang lebih ada di angka 590 menuju ke 600 *barrel per day*. Sehingga asumsi kami jika ada di angka rata-rata seperti itu, maka batas bawah mestinya harus sama dengan apa yang kita bahas, mulai dari pembahasan usulan sampai dengan melihat *outlook* dan hasil *exercise* dengan K3S. Dengan batas atas 8,5 jika situasi *secondary treatment* atau *tertiary treatment* memang membutuhkan penanganan yang lebih lanjut dan percepatan bisa dilakukan, maka angka 8,5 masih bisa dibuka untuk itu.

Selanjutnya untuk volume BBM dan LPG bersubsidi. Untuk volume BBM bersubsidi untuk minyak tanah dan solar. Khusus untuk minyak tanah dan solar, kami mengucapkan banyak terima kasih sekali karena ini memperlihatkan subsidi yang bisa menjawab ketahanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mulai dari wilayah barat sampai dengan wilayah timur, sehingga untuk minyak tanah yang tadinya usulan 0,51 ke 0,55, berubah menjadi 0,55, menjadi 0,58 untuk menjawab gumulan-gumulan yang ada di daerah wilayah 3T, yang belum melakukan migrasi ke gas.

Minyak solar yang tadinya 18,33 sampai dengan 19,44, usulan kami menjadi 18,5 sampai dengan 19,0. Walaupun di *outlook* 2024 diperkirakan sekitar 17,88, tetapi dalam usulan RAPBN 2025 18,33 sampai dengan 19,44. Kami memperhatikan bahwa minyak solar sedapat mungkin ini tetap terjaga sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan angka moderat yang diusulkan adalah 18,5 sampai dengan 19,0. Untuk volume LPG 3 kilogram, usulan RAPBN 18,17, kami usulkan menjadi 18,2 pembulatan ke atas untuk menjawab pertumbuhan ekonomi, gejolak kelangkaan LPG 3 kilogram di berbagai wilayah, dan sebagainya. Untuk subsidi tetap minyak solar di angka 1.000 sampai dengan 3.000.

Sementara untuk subsidi listrik, usulan RAPBN ada di angka 83,02 sampai 88,36 triliun rupiah, kami usulkan menjadi 84 sampai dengan 88,36 triliun, dengan catatan angka 84 berubah untuk menjawab pertambahan penduduk miskin ekstrem sebesar 5 juta penduduk miskin ekstrem, pertambahan pelanggan baru dari program BPBL setiap tahun, dan ini sudah jalan 3 tahun berturut-turut ditambah dengan tahun ini di angka kurang lebih sekitar 130.000 pelanggan baru dari program BPBL untuk 450 dan 900 watt, dan kemudian penyesuaian terhadap ICP, harga ICP dan nilai tukar rupiah yang mengalami fluktuatif, sehingga ada di angka 84 triliun sampai dengan 88 triliun.

Demikian pandangan dari kami Fraksi PDI Perjuangan, terima kasih untuk seluruh masukan, komitmen yang luar biasa dari Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk bisa menjawab seluruh kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

*Wabillahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Lanjut dengan pandangan dari Fraksi Golkar. Kami persilakan.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang saya hormati, Pimpinan Anggota Komisi VII dan tentunya Pak Menteri.

Selamat ulang tahun Pak Menteri, kita sesama *Gemini* berarti ya kalau hari ini Bapak ulang tahun, semoga panjang umur.

Jadi dalam rangka asumsi dasar sektor ESDM untuk RAPBN Tahun 2025 ini, saya akan menyampaikan beberapa pandangan dari Fraksi Partai Golkar, terkhusus tadi ada beberapa nomenklatur yang telah disampaikan kepada kami ya Pak Menteri, yang pertama berkaitan mengenai ICP. Jadi kami menyadari dan juga dengan catatan bahwa nilai tukar rupiah kita tentunya ada dampak terhadap ICP kita. Maka oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menyepakati ketika angkanya yang tadinya usulan RAPBN 2025 adalah di antara 75 sampai 85, kami tawarkan di kisaran 80 sampai 85 *US dollars per barrel*.

Lalu, kemudian yang poin kedua berkaitan mengenai *lifting* migas. Kami mengingat ya, mengingat bahwa kami menyadari kebutuhan di dalam negeri tentunya akan semakin meningkat dan juga target-target terkhusus mengenai *lifting* minyak kita juga yang diharapkan bisa sesuai dengan target. Maka oleh karena itu, untuk *lifting* migas kami tetapkan di angka 1.603 sampai 1.652. Lalu kemudian untuk *lifting* minyak bumi, kami menyodorkan angka 600 sampai 605 ribu *barrels of oil per day*, dengan harapan kita bisa mencapainya ya dan ini akan ada apa, dampaknya terhadap *cost recovery* kita juga.

Untuk *lifting* gas bumi, kami menetapkan sama dengan apa yang telah diusulkan oleh pemerintah, yakni di angka 1.003 sampai 1.047 ribu BOEPD. Kami berharap sebetulnya bahwa angka ini bisa semakin meningkat realisasinya mengingat bahwa untuk *outlook* 2024 angkanya berada di 993,8. Kenapa ini menjadi faktor yang penting, karena kami menyadari bahwa sektor gas ini menjadi salah satu penopang terhadap transisi energi nasional kita, sehingga produksinya harus semakin kita tingkatkan agar kebutuhan-kebutuhan, baik itu domestik maupun yang lebih penting lagi menurut saya, industri ya, jadi kebutuhan industri itu juga terpenuhi dengan baik. Lalu *cost recovery*, kami menyepakati berada di angka 8,25 sampai 8,5 miliar *US dollars*.

Dan berikutnya berkaitan mengenai *volumu*, volume mohon maaf, BBM dan LPG bersubsidi. Dengan catatan, Pak Menteri, catatan utama kami adalah bahwa segala skema subsidi, baik itu untuk BBM maupun LPG dan juga listrik ini harus betul-betul tepat sasaran dan mengacu terhadap data yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Jadi jangan sampai lagi, paling tidak kita harus berupaya gimana caranya meminimalisir pemberian subsidi

yang tidak selayaknya terjadi dan kita sudah membuka beberapa kasus dalam forum rapat di Komisi VII.

Oleh karenanya, volume BBM bersubsidi kami menyodorkan angka 19,05 sampai 19,58 juta kL. Lalu kemudian untuk minyak tanah di angka 0,55 sampai 0,58 juta kL. Berikutnya minyak solar, berada di, sedikit berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, yakni di angka 18,5 sampai 19,0 juta kL. Lalu kemudian volume LPG tiga kilogram, ini menjadi sangat penting karena kami menyadari kebutuhan di kalangan masyarakat, baik itu di tingkat rumah tangga maupun bisnis-bisnis kecil dengan harapan bahwa *multiplier effect*-nya *dapet*, Pak Menteri, jadi akan meningkatkan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi di segala skala *gitu*. Maka kami berharap bahwa bisa lebih tinggi lagi dari apa yang telah diusulkan oleh pemerintah, yaitu adalah di kisaran 8,2 juta MTON.

Lalu yang 2 aspek terakhir, yakni berkaitan mengenai subsidi tetap minyak solar, kami usulkan sama dengan apa yang telah diusulkan oleh pemerintah, yaitu antara 1.000 sampai 3.000 rupiah per liter. Dan yang terakhir subsidi listrik. Jadi untuk subsidi listrik ini, kami harapkan batasan minimalnya itu di angka 84 hingga 88,36 triliun rupiah. Begitu, Pak Menteri.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kami harapkan betul-betul apa yang telah ditetapkan hari ini bisa terealisasi dan tentu dengan tujuan utama yaitu adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut dari Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangannya. Kalau belum hadir, kita lanjut dulu ke Fraksi Partai Nasdem ya.

Silakan, Pak

F-NASDEM (RICO SIA, B.E., S.E., M.Si.):

Kita serahkan ke Pak Ketua, karena yang jago, yang mendalami, dan yang pakar soal ini adalah Pak Ketua kami, Pak Sugeng Suparwoto.

Makasih.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):

Inilah, kita ini *diumbak* terus *gini*.

Ya, baiklah.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan, Pak Menteri, dan juga segenap anggota yang yang terhormat, yang kita hormati.

Jadi betul, asumsi makro yang telah hari ini kita bahas, kami mencatat dengan beberapa hal yang nanti akhirnya tertuang di angka. Bahwa dalam situasi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik ini, memang membutuhkan kecermatan-kecermatan tertentu dalam kita merumuskan asumsi-asumsi, karena dalam asumsi ini adalah tertera juga di situ implisit adalah pendapatan negara, tapi di sisi lain juga belanja negara.

Jadi apa yang kita diskusikan adalah sangat menentukan menyangkut tentang *lifting*, tentang ICP, tentang subsidi atau volume subsidi minyak tanah, solar, dan juga LPG. Dan sudah barang tentu sangat tergantung juga situasi-situasi global, di antaranya persoalan-persoalan yang sekarang melanda, misalnya dolar yang terus merambat gara-gara keputusan Federal Reserve yang menyatakan tidak akan lagi memangkas suku bunga sehingga diperkirakan suku bunga masih relatif tinggi di dunia.

Nah, faktor-faktor itu juga bagi kami di Partai Nasdem menjadi pengamatan yang sangat-sangat serius sehingga kita dalam hal ICP misalnya, kita tahu bagaimana OPEC dan *plus (+)* dan juga terus memantau bagaimana tetap mempertahankan, kalau kita tangkap adalah tetap harga di tinggi, minyak tinggi. Ketika harga turun, meskipun *demand* turun dunia, tetapi tetap diupayakan harga di kisaran 80 dolar per *barrel*. Itulah juga yang menjadi tampaknya tren dunia, sehingga kita sepakat dalam diskusi-diskusi intern kami dengan *stakeholder* yang lain adalah bahwa ICP kita tetapkan di 85, maaf 80-85.

Demikian juga di *lifting* migas. *Lifting* migas, kita tahu kita *lifting* kita sangat tergantung dari blok-blok yang Rokan, maaf ya Rokan dan Cepu, Banyu Urip, dan yang lain-lain. Nah, kita berharap ke depan ini ditambah dari blok-blok lain yang akan segera menghasilkan juga, sehingga meskipun ada tren namanya apa, turun, tetapi kita berharap tetap kita dengan *lifting* minyak bumi di kisaran 600.000 *barrel* per hari. Sehingga kita menjadi batas bawah 600.000 barel sampai 605 sebagaimana juga didiskusikan dengan kawan-kawan yang lain. Kenapa demikian? Ini meng-*encourage* kita semuanya, meskipun ada semacam *natural decline* yang besarnya 4% kurang lebih, tetapi kita bahagia kemarin dalam paparan di mana Pertamina yang sudah memproduksi kurang lebih 60% lebih dengan R2P yang cukup bagus, 7 tahun plus, dan juga R3 yang bagus 100% lebih. Jadi kita harapkan *backbone-backbone* ini kita bisa optimalkan, sehingga kita berharap angka psikologis sebetulnya, Pak Menteri dan Kepala SKK, ini kita tetap pertahankan di 600.000 *barrel per day*.

Ini sebenarnya sebuah angka psikologis, kenapa demikian? Ada konsekuensi lain, yakni di *cost recovery* secara akumulatif. Kita tahu *cost recovery* sebagaimana juga diinginkan juga di Komisi VII tidak hanya *cost*

recovery sifatnya produksi, tapi ada *cost recovery* eksplorasi, sehingga melakukan pengeboran seismik dan seterusnya tercakup di situ. Sehingga *cost recovery* kita sepakat dengan usulan pemerintah, bahwa meskipun ada tren turun tapi *cost recovery* coba kita angkat naik supaya bisnis di hulu itu juga tetap menarik, sehingga tetap kita membutuhkan aktivitas di hulu yang sehingga kita bisa mempertahankan produksi *lifting* di 600-an ribu angka psikologis. Dan *cost recovery* kita patok di angka, maaf di 8,25 sampai 8,5 triliun rupiah, nah inilah.

Demikian juga di tadi *lifting* gas, saya kira sepakat kita, kita, kita senang karena gas ada tren yang naik, baik temuan-temuan baru atau cadangan, maupun dari sisi produksi. Dengan Tangguh Train 3 sudah *upstream*, maka sekarang kita *firm* di 6.000 *barrel* per 6000 mm kurang lebih per hari. Jadi dengan demikian, kita sebagaimana juga gas yang akan menjadi, akan mengisi transisi energi karena meskipun tidak *renewable*, tapi itu adalah bersih, maka kita sepakat dengan pemerintah mengajukan usulan di APBN 2025 adalah kurang lebih 1.003 sampai 1.047 mm per *day*. Saya kira itu.

Demikian juga volume LPG, LPG 3 kilogram. Kita tahu LPG masih menjadi urat nadi ekonomi, utamanya masyarakat tidak mampu dan juga usaha kecil. Maka kalau kita lihat *outlook* gas LPG, itu kurang lebih di angka, maaf 8 juta sekian ton per tahun. Maka dari itu, volume LPG yang kita usulkan adalah di angka 8, maaf mana kok saya, 8,2 ya, bulat di 8,2 metrik ton per tahun.

Nah tetap isu tetap, tepat sasaran menjadi isu penting, kenapa? Karena subsidi adalah untuk masyarakat tidak mampu dan usaha kecil, yang kita tahu sering terjadi kebocoran-kebocoran termasuk akurasi timbangan per kilogram. Sehingga aspek-aspek yang sifatnya apa, keadilan juga apa, mencakup subsidi yang memang bagi mereka yang berhak.

Demikian juga subsidi lain menyangkut tentang subsidi minyak tanah dan minyak solar. Minyak tanah sebagaimana kita ketahui masih sangat dibutuhkan untuk saudara-saudara kita di wilayah timur yang memang belum mengalami apa, pergantian dari minyak tanah ke LPG. Sehingga minyak tanah dengan juga ada asumsi pertumbuhan ekonomi sekian-sekian, maka juga konsumsi minyak tanah atau *demand* minyak tanah dipastikan akan naik. Maka kami melihat perlunya kenaikan di volume minyak tanah, yakni dari 0,55 sampai 0,58 apa, metrik ton per tahun.

Demikian juga minyak solar yang waktu (*suara kurang jelas*) kemarin memang dan ini baik, khususnya solar subsidi ini betapapun juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang diharapkan tumbuh mencapai nanti 5,2% kurang lebih, maka di solar, demikian juga volume untuk naik jadi 18,5 ke 19 juta kilo liter per tahun. Tadi volume LPG sudah, jadi kurang lebih 8,2 juta metrik ton per tahun. Nah, kita harap di subsidi 8,2 juta ton ini, Pak Menteri dan Pak Kepala SKK, kita harapkan sumbernya tidak semata-mata dari impor. Kita ingin bahwa kilang-kilang dan sebagainya bisa juga memproduksi LPG secara signifikan.

Kita dengar, misalnya kilang Balikpapan yang *insyaallah* besok akan kita kunjungi, meskipun tiga minggu yang lalu kebakaran *gitu*. Ini diharapkan juga mampu memproduksi LPG dan seterusnya-seterusnya, sehingga volume subsidi 8,2 juta metrik ton tersebut tidak semata-mata seluruhnya impor. Sebagaimana kita ketahui LPG atau harga LPG juga sangat tergantung harga fluktuatif, harga *crude* dunia. Jadi demikian. Sementara di subsidi minyak solar yang besarnya berapa per liternya adalah kita sepakat sebagaimana diajukan oleh pemerintah, yakni antara 1.000 sampai 3.000.

Kemudian terakhir adalah subsidi listrik. Nah, listrik di Komisi VII kita berkali-kali tekankan bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok masyarakat. Maka Komisi VII berkali-kali meminta agar negara hadir di seluruh keluarga masyarakat Indonesia dimanapun berada adalah tentang hadir dalam konteks listrik. Maka ada konsekuensi logis dari itu, yakni bagaimana baik subsidi dan juga pembangunan infrastruktur untuk listrik desa dan sebagainya, maka diperkirakan memang akan menaiki, akan mengalami kenaikan. Sebagaimana juga apa ini, subsidi listrik yang terus-menerus naik. Di APBN tahun 2024 yang lalu adalah 73,24 triliun dan *outlook*-nya adalah 77,8 triliun dan usulan APBN pemerintah pun menyadari itu, sehingga naik ini dari usulan APBN pemerintah. Kami pun mengusulkan bahwa subsidi listrik akan naik dari antara 84 sampai 88,36 triliun.

Demikian Bapak-Ibu sekalian. Dari Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa aspek *prudent*, kehati-hatian, kecermatan tetap menjadi pegangan kita semuanya. Tetapi tetap saja ada optimisme pertumbuhan ekonomi yang 5,2% itu adalah juga membutuhkan apa, *demand* energi yang juga naik. Sehingga dalam seluruhnya kalau kita lihat ada kenaikan-kenaikan di, baik di *lift*-, maaf di apa, ICP, juga demikian juga di subsidi, itu semata-mata karena memang *demand* energi untuk naik ekonomi 5,2% itu adalah juga akan meningkat. Saya kira itu.

Terima kasih semuanya.

Saya kembalikan ke, kami kembalikan ke Pimpinan Sidang. Dipersilakan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (RICO SIA, B.E., S.E., M.Si.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Diwakili oleh Bapak Sugeng Suparwoto.

F-NASDEM (RICO SIA, B.E., S.E., M.Si.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya?

F-NASDEM (RICO SIA, B.E., S.E., M.Si.):

Apa boleh saya menambahkan sedikit saja soal dapil terkait dengan minyak tanah?

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA, B.E., S.E., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih kepada Pak Ketua, Bapak Sugeng Suparwoto yang sudah luar biasa menyampaikan. Mewakili kami dari Fraksi Nasdem.

Hanya menambahkan sedikit terkait dengan minyak tanah dan minyak solar sebagai substitusi dari kami di Papua Barat yang Papua Barat dan Papua Barat Daya, khususnya di Papua semuanya yang tidak mendapatkan LPG 3 kilo. Kami mohon agar minyak tanah dan minyak solar ini kami mendapat bagian porsi yang juga mungkin sedikit lebih banyak lagi, karena tadi tidak ada LPG 3 kilo di sana. Masyarakat membeli harga LPG semuanya dengan harga normal, bahkan lebih mahal dari itu. Oleh karenanya sekali lagi, mohon kiranya untuk minyak tanah sama minyak solar tentunya kami kebagian lebih sedikit di wilayah timur.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Rico.

Lanjut Fraksi PKB. Ibu Ratna, silakan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati, Bapak Ketua Pimpinan serta seluruh sahabat-sahabat di Komisi VII,

Yang kami banggakan, Pak Menteri beserta seluruh Dirjen, juga ada Pak Irjen, juga ada Pak Kepala SKK, Kepala BPH, perwakilan dari Pertamina, PLN, dan semuanya yang hadir.

Kami ingin menyampaikan pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap asumsi makro sektor energi yang akan disampaikan oleh Komisi VII pada hari ini, Rabu 19 Juni 2024.

Yang pertama usulan ICP, kami mengusulkan di 80 sampai dengan 85 US *dollar* per barel. Untuk *lifting*, minyak bumi kami mengusulkan di angka 600 sampai dengan 605 ribu barel *oil per day*. Untuk gas, kami mengusulkan di angka 1.003 sampai dengan 1.047 ribu barel *oil per day*. Untuk *cost recovery*, kami mengusulkan di angka 8,25 sampai dengan 8,5 miliar US *dollar*. Dengan catatan Bapak, kami memohon bahwa untuk berikutnya, meskipun SKK Migas ini tidak harus mempertanggungjawabkan nilai *cost recovery* kepada kami di Komisi VII, tapi kami berharap minimal kami mendapatkan salinan apa yang telah dilaporkan ke Kementerian Keuangan.

Yang berikutnya minyak tanah, kami mengusulkan di angka 0,55 sampai dengan 0,8 juta kiloliter. Minyak solar 18,5 sampai dengan 19,0 kiloliter. Volume LPG 3 kilogram di nilai 8,2 juta metrik ton, dan kami juga sangat berharap bahwa saudara-saudara kami yang ada di Indonesia Timur ini segera bisa merasakan LPG 3 kilogram. Jadi kami membutuhkan kepastian juga tenggang waktu untuk pelaksanaan konversi dari minyak tanah maupun solar ke LPG.

Yang berikutnya subsidi tetap minyak solar per liter, kami mengusulkan di angka 1.000 sampai dengan 3.000. Yang terakhir untuk nilai subsidi listrik, kami mengusulkan untuk kenaikan Pak Menteri, di 84 sampai dengan 88,36 triliun.

Yang terakhir Pimpinan, kami izin menyampaikan hari ini Pak Menteri kan ulang tahun, jadi sepertinya saya ada hadiah *gitu* buat Pak Menteri. Hadiahnya yang pertama aspirasi dari daerah pemilihan Pak, Kabupaten Tuban ada yang namanya Desa Tegalagung di Kecamatan Semanding, jaraknya hanya 1 km dari kota/kabupaten begitu. Tapi ternyata di sana masih ada 50 KK yang belum menerima perluasan jaringan listrik Pak. Jadi sementara ini, jaringannya itu masih dilaksanakan secara swadaya karena PLN menyatakan tidak mampu untuk menambah jaringan di sana, sehingga kabel-kabel yang ditarik oleh, dari KK per KK ini masih dilakukan secara sangat tradisional dan menurut kami itu berbahaya. Selain, juga tentu mengganggu keindahan desa begitu ya, karena kan pasti kabelnya semrawut dan lain sebagainya. Jadi kami mohon itu segera diselesaikan Pak, toh ini subsidi listriknya juga ada kenaikan *gitu*.

Yang kedua Pak, kami juga mendapat titipan aspirasi dari Kabupaten Sikka, Provinsi NTT. Kebetulan di sini juga anggota sepertinya tidak ada yang dari daerah pemilihan tersebut, Pak. Ada 13 desa atau tepatnya 2.400 KK yang membutuhkan bantuan pasang baru listrik gratis. Ada 3 desa, 450 KK yang

membutuhkan pembangkit listrik tenaga surya tersebar karena tempatnya itu di kepulauan. Dan yang terakhir, ada 7 kecamatan atau 40 desa Pak, yang membutuhkan perluasan jaringan untuk di setiap dusun-dusunnya. Di Kabupaten Sikka ini menurut data PLN, masih 93% Pak elektrifikasinya, rasio elektrifikasinya, sehingga mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Pimpinan. Kalau diizinkan saya ingin menyerahkan secara langsung usulan dari masyarakat tersebut.

Terima kasih, mohon maaf kami akhiri.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Tolong kamera ditujukan Bu Ratna.

Tadi disampaikan aspirasinya, Pak Menteri, nanti kue ulang tahunnya menyusul Pak Menteri.

Lanjut dari Fraksi Partai Demokrat, kami persilakan.

F-DEMOKRAT (SARTONO, S.E., M.M.):

Bismillah.

Terima kasih, Pimpinan

Yang kami hormati, para Sahabat Komisi VII,
Yang kami hormati, Pak Menteri ESDM dengan seluruh jajarannya. Hadir di sini ada SKK Migas, BPH Migas, PLN, Pertamina.

Pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun Pak Menteri, senantiasa sehat, sukses, dan panjang umur. *Amin ya rabbal alamin.*

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan setelah melalui proses panjang begitu, diskusi yang mendalam dan dalam sekali begitu, tentang bicara usulan daripada IPC dan beberapa subsidi maupun *lifting* minyak. Selain di forum terbuka, ada juga forum tertutup dan itu proses yang panjang *gitu* untuk kita memutuskan tentang IPC. Kami bersepakat bahwa range 80 sampai 85 US *dollar* per barel ini suatu hal yang realistis begitu, berdasarkan tadi disampaikan oleh beberapa sahabat. Dinamika perekonomian dunia juga terjadi suatu fluktuasi, dan ini mungkin juga akan bisa setiap saat ada perubahan-perubahan. Tapi kami bersepakat untuk *range* 80 sampai juga 85 US *dollar* per barrel.

Perihal *lifting* migas, kalau berdasarkan paparan-paparan selama ini oleh pihak kementerian atau pemerintah, *kan* ada, ada potensi yang menjanjikan. 5 tahun yang lalu sebetulnya Pak Menteri, kami juga

mengharapkan dari sektor migas itu bisa apa, memberikan lompatan begitu di dalam eksplorasi maupun eksploitasi daripada migas ini, yang nantinya akan juga bisa memberikan subsidi APBN dari apa, sektor migas ini. Kami bersepakat dengan *range* usulan kami 9, eh maaf, 1.603 dan 1652, ini saya pikir yang menjadi apa keputusan kami. Juga *lifting* minyak bumi. Ini awal-awal kita rapat dahulu juga kita Komisi VII juga memberikan dorongan penguatan agar sektor *lifting* minyak ini bisa dimaksimalkan ya, dengan dinamika permasalahan yang ada waktu itu. Kita juga bicara tentang kebijakan perubahan, ingat waktu itu kita Blok Masela ya, antara *onshore* maupun *offshore* gitu.

Waktu itu kita mempunyai harapan yang tinggi dari Sektor Masela itu agar bisa menambahkan atau sudah dapat kita nikmati saat ini. Tapi realitas objektif, itulah yang kita dapatkan dan kami bersepakat, sekarang ini *range*-nya 600 sampai dengan 605. Harapan nanti ada suatu hal yang apa itu, kejutan begitu, ada temuan sumur-sumur baru begitu, Pak Menteri. Nanti yang jelas saya juga ingin mendengarkan harapan apa, pengalaman-pengalaman 5 tahun ini yang jadi kendala, mengapa sektor daripada *lifting* ini kita bisa *decline* begitu. Dan kami bersepakat *range* 600 sampai juga 605.

Juga *cost recovery*. Sebetulnya ini yang juga menjadi perdebatan begitu. Tetapi kalau *lifting* kita juga tinggi, ya sebetulnya tidak jadi begitu apa, bermasalah. Tetapi permasalahan kita ini *kan lifting* kita, satu sisi konsumsi kita 1.2 juta barel per hari, nah yang kita hasilkan 600 ribu barel per hari. Kami bersepakat enam, 8,25 *range*-nya dan juga 8,5.

Perihal volume BBM bersubsidi, ini *range* kita 1905 sampai juga 1958. Ini proses juga panjang dialog-dialog, pendalaman-pendalaman di apa, di dalam memutuskan subsidi ini. Tentang minyak tanah, ini juga 0,55 *range*-nya sampai 0,58. Ini juga bisa memengaruhi kehidupan masyarakat begitu, karena sektor ini juga masih apa, banyak juga digunakan oleh masyarakat. Solar, *range*-nya 18.5 sampai 19.

Lah ini LPG 3 kilogram. Ini juga masih menunjukkan kalau negara hadir untuk memberikan subsidi kepada masyarakat, UMKM, atau masyarakat yang memerlukan. Hanya *notes* begitu Pak Menteri, ke depan ini juga harus ditingkatkan supaya tidak terjadi apa kebocoran-kebocoran yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang yang berhak menerima sama yang apa, bocor ini, mungkin bisa-bisa lebih banyak yang bocor, ya ini juga harus menjadikan *concern* begitu. Agar harapan daripada negara, dalam hal ini pemerintah maupun legislatif, dengan adanya subsidi ini betul-betul bisa meringankan ya beban juga masyarakat, menaikkan kehidupannya, dan muara akhirnya juga apa, meningkatkan daya beli rakyat, juga meningkatkan perekonomian negara kalau betul-betul tepat sasaran, kalau tidak ada apa, permasalahan-permasalahan di lapangan. Kalau ini bisa kita minimalkan begitu, akan lebih dahsyatnya itu apa, program subsidi negara ini untuk rakyat.

Terakhir, subsidi listrik *range*-nya 84 dan juga 88,36. Betul bahwa kebutuhan dasar masyarakat kita adalah listrik. Setiap ada kenaikan-kenaikan listrik juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan ini dilihat

daripada keputusan atau asumsi daripada usulan daripada negara, pemerintah, ini juga masih ada kepedulian. Pemerintah atau negara hadir terhadap kehidupan apa kesejahteraan masyarakatnya.

Demikian Pimpinan, pandangan-pandangan dari Fraksi Partai Demokrat tentang apa, asumsi makro yang diusulkan oleh pemerintah dalam forum rapat kerja pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin akan tambahan, izin, Pak Hendriks memberikan tambahan dalam forum ini.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK HALOMOAN SITOMPUL, M.M.):

Terima kasih, Mas Sartono.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Horas, Pak Menteri, selamat ulang tahun.

Pak Menteri saya sangat berharap sekali, harapan sekali kepada Kementerian ESDM terkait dengan peningkatan pengawasan, Pak Menteri. Karena Kementerian ESDM itu memberikan izin, harusnya juga pengawasan ditingkatkan. Saya hanya mau menitip Pak Menteri, supaya ke depan kebocoran-kebocoran pendapatan negara dan daerah jangan terulang lagi. Itu terkait dengan peredaran minyak nonsubsidi yang hari ini saya kira luar biasa dan perlu kita awasi. Ini sangat potensial kebocoran pendapatan negara dan daerah. Jadi saya sangat berharap sekali Pak Menteri, Kementerian ESDM betul-betul meningkatkan pengawasan peredaran minyak dan gas nonsubsidi ya, bukan subsidi, non subsidi. Ini luar biasa Pak. Ya, karena setahu saya, regulasi terhadap minyak ini cukup ketat dari kementerian ya, berbeda dengan tambang. Kalau minyak dan gas ini sangat ketat, banyak regulasi berlapis di sana. Tapi kenapa peredaran BBM nonsubsidi itu luar biasa, ya. Itu saya kira, saya sangat berharap sekali Pak Menteri. Ini penting untuk NKRI ini, Pak Menteri. Saya bukan untuk pribadi, untuk NKRI ya, karena di sana sangat luar biasa saya lihatnya. Itu untuk minyak dan gas.

Yang kedua juga untuk penambangan, Pak Menteri. Tolong diawasi juga penambang-penambang ini melihat status tanahnya, Pak Menteri. Kami mendapatkan status tanah HGU yang harusnya perkebunan, dijadikan penambangan tanpa proses yang benar. Ini juga ada dan jangan saya begini, kalau boleh waktu memberikan RKA, izin RKAB itu, selesai dulu status tanahnya, jadi tidak ada lagi, jangan tunggu di masalah nanti ada baru diselesaikan. Kalau boleh dari awal kita selesaikan dulu tanahnya, baru kita berikan RKAB-nya. Karena kami ada ada temui *gitu* lho, bahwa ada tanah HGU perkebunan dijadikan pertambangan dan ini prosesnya tidak, tidak baik *gitu* lho. Dan ini saya kira harapan kita Pak Menteri, dari Kementerian ESDM betul-betul

melakukan peningkatan pengawasan. Sekali lagi, yang paling serius sama saya itu adalah BBM nonsubsidi ya, peredarannya luar biasa.

Terima kasih Pak Menteri. Kembali ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Hendrik.

Kami lihat sudah ada kehadiran dari Fraksi Partai Gerindra. Kami persilakan Pak Ramson sebelum nanti kita ke Fraksi PKS.

Silakan, Pak Ramson.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Makasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati, Pak Ketua Rapat dan Pimpinan dan teman-teman Anggota yang terhormat,

Yang saya hormati, Pak Menteri dan jajarannya semua, para Dirjen, Irjen, dan juga para Dirut BUMN terkait dan BPH Migas, SKK Migas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Kebetulan saya baru pulang dari dapil ini, penyerahan sapi kurban ke sekian tempat jadi suasana melihat bagaimana perkembangan masyarakat di dapil saya. Juga banyak isu-isu yang memang diharapkan oleh rakyat kebijakan-kebijakan negara yang mempermudah masyarakat.

Asumsi dasar yang kita bahas ini, tentunya ini sebagai referensi untuk Bapak Presiden mengajukan rancangan APBN nanti tanggal 15 atau 16 Agustus. Kalau yang betul-betul APBN itu, RAPBN itu baru sesudah Bapak Presiden menyampaikan rancangan APBN secara resmi dari pemerintah kepada parlemen. Jadi ini sebagai referensi sebenarnya di mana di sini hak *budget* DPR RI bisa direalisasikan, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah saat mau membuat rancangan APBN sesuai dengan amanat konstitusi bahwa DPR RI punya hak pengawasan, juga punya hak *budget*.

Pak Ketua, ini dari sekian banyak draf yang *udah* disampaikan oleh pemerintah, baik oleh Ibu, baik oleh Pak Menteri ESDM, juga oleh Menteri Keuangan di rapat paripurna, di sini kami dari Fraksi Gerindra menyampaikan untuk bahan nanti RAPBN yang akan diajukan oleh Pak Presiden.

Pertama, untuk *Indonesian Crude Price* (ICP), memang sekarang tren sementara harga minyak mentah di pasar global ada peningkatan. Tetapi saya melihat sebenarnya di tahun 2025 itu dengan peningkatan *speed* penggunaan energi baru terbarukan dalam proses transisi energi secara global, cenderung harga *crude* juga akan menurun. Tetapi, karena kita masih melihat prediksi ini

untuk jangka pendek, ini masih bulan Juni sementara 2025 baru dimulai Januari 6 bulan lagi, sehingga tentu kita masih dipengaruhi oleh persepsi-persepsi dari perkembangan harga dalam waktu dekat. Tapi kalau saya secara pribadi melihat bahwa tahun 2025 akan ada penurunan harga *crude*. Tetapi karena melihat jangka masih jangka pendek, sehingga di ICP ini kami mengajukan *range*, Pak Ketua, antara 80 ke 85 US *dollar* per barel, 80 ke 85.

Untuk *lifting* migas, di sini *lifting* minyak bumi bahwa ada pengajuan 600.000 barel ke *range* 605.000 barel. Tetapi kita minta nanti pemerintah di dalam pendalaman agar bisa menjelaskan karena ini, kita membahas ini juga ada *lifting* minyak bumi ada korelasinya dengan pertumbuhan *cost recovery*. Sehingga perlu disampaikan oleh pemerintah karena punya instrumen untuk itu, ada SKK Migas yang di, di-*manage* oleh Menteri ESDM, ditugaskan menyampaikan realitas yang masih diproduksi dengan sistem *cost recovery* sebenarnya berapa ratus ribu barel per hari? Dan yang masih menggunakan sistem *gross split* berapa banyak?

Karena lima tahun yang lalu *kan* ada, periode kemarin ada pergeseran, ada suatu ide waktu itu dari pemerintah, Menteri ESDM, selain *cost recovery*, juga diterapkan, dilaksanakan *gross split*. Sehingga kalau *gross split* kan tidak masuk di dalam *cost recovery*. Jadi itu nanti perlu juga catatan bagi Komisi VII DPR RI supaya Komisi VII mempunyai data itu. Jadi apakah nanti *lifting* minyak bumi untuk yang dihasilkan tahun 2025 semuanya hasil *cost recovery* atau masih banyak dihasilkan oleh sistem *gross split*. Terus *range* yang kami ajukan 600 ke 605 ribu barel, Pak Ketua.

Terus untuk *lifting* gas bumi juga setara 1.003.000 ke 1.047.000 barel per hari karena memang ada peningkatan *lifting* gas bumi atau produksi gas bumi, dan memang ini seiring juga dengan proses transisi energi. Karena gas bumi memang masih apa namanya, tidak termasuk energi terbarukan, masih energi fosil, tetapi cenderung bersih. Jadi dalam proses transisi energi, gas bumi sebenarnya sangat berperan. Jadi kalau Bapak Menteri ESDM dulu pernah menyampaikan bahwa 2060 akan *net zero emission*. Sebenarnya tidak harus semua sudah habis energi fosil pada 2060. Saya melihat potensi gas bumi masih bisa digunakan pada saat 2060 biarpun di situ ada *goal target* 2060 bakal masuk ke era *net zero emission*. Jadi kami sepakat Pak Ketua, dengan *lifting* gas bumi.

Terus *cost recovery*, karena tadi itu bahwa dari tren sebelumnya selalu naik *cost recovery*, pemerintah juga telah mengajukan dengan argumentasi-argumentasi, kami setuju 8,25 miliar US *dollar range*-nya ke 8,5 miliar US *dollar*. Tapi dengan tadi catatan, ada penjelasan dari 8,25 ke 8,5 miliar US *dollar range*-nya ini akan menghasilkan sebenarnya berapa ratus ribu barel minyak khususnya ya. Juga termasuk juga gas bumi yang mungkin ada yang diproduksi dengan sistem *gross split*. Jadi itu perlu penjelasan nanti itu sebagai catatan.

Volume BBM dan LPG bersubsidi, bahwa untuk BBM bersubsidi memang di lapangan, khususnya untuk BBM, saya pikir sebenarnya itu perlu pengawasan yang lebih ketat untuk BBM dan saya lihat tetap ada peningkatan.

Tapi malah di lapangan sebenarnya, Pertamina itu sudah banyak menjual yang non apa namanya, yang yang non-penugasan. Ini apa ini, terlalu besar *nggak* ini, volume ini ya, ini perlu sementara sebagai catatan. Tapi karena pemerintah ingin meningkatkannya, jadi kami sepakat *aja* 9,05 juta kiloliter ke 19,58 juta kiloliter.

Tapi ini juga catatan melalui Menteri ESDM untuk Pertamina Pak Menteri, ada kelemahan Pertamina. Kenapa waktu itu membuat kebijakan membangun Pertashop? Sehingga banyak yang tadinya orang ada punya modal 1 miliar, diinvestasikan. Kalau uangnya sendiri *full* masih oke, dijual sawah, itu masih oke, tapi *minjem* lagi dia, tahu-tahu dia *break event point* aja tidak tercapai. Ini supaya autokritik aja kita Pak Menteri, ya.

Jadi kita itu kalau membuat kebijakan jangan hanya dari sisi kita, kita mesti lihat kira-kira *gimana*, apalagi urusan kepentingan rakyat ya. Kalau saya kepentingan rakyat, saya tetap di DPR RI ini, karena untuk kepentingan rakyat, bukan untuk gagah-gagahan. Sejak tahun '99 saya di DPR RI ini, bukan malah keuangan saya makin bagus. Dulu saya sebelum DPR RI, saya bisnis saya cukup bagus saya di Pertamina perkapalan *sono*, di sana dulu Pak. Saya boleh ditanya dulu zaman-zaman orang dulu tuh. Tapi di sini saya kalau udah berjuang kepentingan rakyat, itu saya senang, kebijakan-kebijakan kepentingan rakyat.

Saya lihat Pertashop itu Pak Menteri, coba dicek itu bangkrut semua. Berapa banyak uang yang *idle* itu, yang nganggur. Padahal mereka kemampuannya pas-pas, karena tadi mereka ingin bangga sebagai pengusaha apa namanya, SPBU ya, biarpun kecil, bangga di kecamatan. Dia jual sawahnya atau dia pinjam, tahu-tahu *break event point*-nya, akhirnya bangkrut, *stop*. Seharusnya kalau memang tidak bisa menjual Peralite yang non-penugasan, ya jangan dikasih kebijakan itu. Seharusnya seperti itu. Ini untuk nanti yang lebih muda ini, yang di barisan dua tiga nih, kalau suatu saat naik harus berpikir komprehensif.

Padahal zaman dulu di Lemhanas selalu komprehensif, maksudnya itu sebenarnya melihat dari berbagai macam sektor *gitu*. Dampaknya bagaimana, jangan asal kita membuat kebijakan, termasuk juga Dirjen Migas nih, Pak Dirjen Migas, seperti ini, ini belum masuk ke LPG. Katanya sekarang karena hanya 10% ke pengecer, sekarang itu di, saya pikir di *online* juga banyak beritanya, susah rakyatnya cari LPG, karena dia harus ke pangkalan jauh ke mana. Ah itu ada berita, bukan kita *ngarang-ngarang* nih. Selain artinya mendapat apa, informasi langsung dari masyarakat di dapil, tetapi di berita-berita juga muncul. Mereka susah, hanya untuk mendapatkan LPG 3 kilogram, susah, harus ke mana ke mana, hitung-hitung *cost* energi, tenaganya, belum lagi ongkosnya kalau naik motor caranya. Mending kalau naik motor, kalau naik sepeda?

Ah itu, jadi itu semua harus dipikirkan juga seperti itu. Kita *kan* bagaimana membuat kebijakan mempermudah rakyat. Kalau memang *udah* kita kasih subsidi, kita mempermudah, kalau enggak jangan kasih subsidi. Saya berpikirkannya seperti itu, bagaimana mempermudah rakyat. Itu banyak ini, mesti lihat ke lapangan dong. Kalau saya *kan* kebetulan selalu lihat ke lapangan,

biarpun saya lihat ke atas juga, saya *udah* lima kali debat di kongres Pak, sebagai Anggota DPR RI dari dulu, dari tahun '99, bukannya misalnya saya kacangan juga, bukan. Di, di parlemen Tiongkok, di Jerman, konferensi parlemen sedunia soal pembangunan berkelanjutan, banyak itu. Kita juga tahu soal itu, tapi kita harus lihat juga ini, ini yang rakyat kecil *gimana* ini. Nah, itu di dalam membuat kebijakan itu.

Jadi soal LPG, tadi saya setuju menjadi 8,2 Pak Ketua. Malah kalau sebenarnya ini, kalau untuk tadi menghindari susah-susah rakyat mencari itu, bila perlu dinaikkan jadi 8,4. 8,4 juta metrik ton bila perlu. Tapi sementara ini 8,2 juta metrik ton.

Terus yang keempat subsidi solar, ini 1.000 ke 3.000 rupiah per liter. Ini *range*-nya sekitar itu. Kita serahkan kepada pemerintah untuk memutuskan soal subsidi solar karena solar juga *udah* banyak untuk kepentingan-kepentingan bisnis yang lebih maju.

Terus subsidi listrik, 84 triliun ke 88,36 triliun. Ini Pak Menteri, ini PLN perlu diingatkan bahwa mereka itu bukan hanya ini subsidi ke mereka sebenarnya. Ada proteksi dari Komisi VII DPR RI yang mendesak pemerintah waktu tahun 2017-2018, selain *domestic market obligation*, ada *domestic price obligation*. Itu berapa ratus triliun, artinya selamat *potential loss* dari situ. Bayangkan dengan 70 US *dollar* per barel eh per, per itu, per metrik ton mereka beli. Padahal harga pasar 200, 300 US *dollar*, 300 dikurangi 70, jadi mereka selamat 230 US *dollar* per metrik ton kali sekian puluh juta, itu berapa ratus triliun itu.

Itu harus diingatkan juga mereka, supaya tetap mereka efisien mengelola PLN. Karena, karena kalau tanpa itu *udah* rugi, padahal dengan adanya DPO itu, mereka untung, untungnya gede, direksinya juga dapat bonus *kan*. Dapat apa? Tantiem ya? Besar-besar juga itu *kan*. Jadi itu *side effect*-nya lho.

Jadi ini BUMN-BUMN ini *kan* padahal dibantu oleh kebijakan, untung gede, jadi dapat tantiem yang besar juga, iya *kan*? Bukan kecil-kecil, M, ya *kan* M, ya Pak Menteri *kan*? Jadi harus diingatkan juga, kalau enggak diingatkan nanti merasa karena kehebatannya ya.

Terus, saya pikir itu *aja* Pak Ketua, karena agak sedikit menyita waktu karena memang perlu juga kita ingatkan, baik Menteri ESDM sebagai di sini *lead* pembuat kebijakan, juga operator-operator termasuk PLN, Pertamina, SKK Migas, dan juga BPH Migas.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Ramson Fraksi Partai Gerindra.

Kami lanjut dari Fraksi PKS, kami persilakan. Silakan Pak Tif.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Pak Menteri selamat ulang tahun nih, mudah-mudahan umurnya diberkahi oleh Allah, dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga.

Dahulu bertanam seledri,
sekarang bertanam sayuran,
dahulu saya jadi Menteri,
sekarang Anggota Dewan, Pak ya.

Jadi ini saat-saat terakhir dari Pak Menteri ini *kan*. Artinya kurang lebih 3 bulan lagi ya? Dan kata orang "*the life start from 71 years old*", katanya *gitu*. Sekali lagi selamat, Pak Menteri.

Dan tentu pemerintah ini akan berganti, juga teman-teman dirjen juga kemungkinan diganti. Saya lihat tim Gerindra ini sudah otak-atik semua eselon ya? Kerja sama dengan PAN, saya lihat itu, sudah *nyusun-nyusun* ya kayaknya itu. Jadi kemungkinan juga akan berganti semua dirjen ini nanti. Nah, tapi paling tidak kita memberikan satu *legacy* ya, warisan yang baguslah, yang *beyond generation*, *gitu* ya. Biasanya itu *kan values* ya Pak ya, nilai-nilai. Nah, kalau yang sifatnya fisik ini *kan* cepat apanya, cepat apa, cepat pudarnya tuh.

Baik, jadi ini memang kalau dilihat terpilihnya Pak Prabowo ini di kalangan bisnis itu mereka bilang "*cheer*" ya. *Cheer* itu karena menghilangkan, apa istilahnya, *uncertainty*, *udah* berjalan, enggak ada *chaos gitu kan*. Wah ini Indonesia nih, negara sebesar ini, *gitu* ya. Tapi di kalangan sipil ya, tentu banyak juga kritikan ya, Pak Ramson ya? Bagaimana kekhawatiran tentang proses demokrasi dan sebagainya. Beliau ya dengan *background military* terus *very close with former President* atau Presiden sekarang *gitu kan*. Ah itu memang mendapat ini. Tapi paling tidak kita ke depan ini tentu akan lebih baik ya, dan namanya asumsi, jadi asumsi itu *kan hope* Pak ya, harapan juga. Dan kalau *hope* itu *nggak* tercapai ya, seperti teman-teman, Pak Ramson juga mengingatkan, tolong diberikan apa, rasionalisasi, kenapa tidak tercapai dan kita harus berani mengoreksi asumsi-asumsi tersebut.

Dan tentunya harapan itu harus visioner ya, artinya kita tahu apa yang akan dicapai ya, *what is that goal*. Tapi kita tahu juga tentang *what is the step to reach the goal*. Nah ini, ini ini sebetulnya kita *pingin* tahu saja apa yang akan

dilakukan, walaupun mungkin sebentar lagi ini akan berganti dan proses ini akan selalu dinamis, karena kalau begitu diumumkan susunan kabinet, *teamwork*-nya orang juga akan menilai kembali, Pak ya. Akan melihat kembali kira-kira ini memberikan harapan yang seperti apa di masa yang akan datang.

Tadi sudah diulang-ulang juga oleh kawan-kawan bahwa asumsi ini adalah satu acuan bagi *budget* kita ke depan yang nanti mungkin rangkumannya akan disampaikan oleh presiden di tanggal 16 Agustus ke depan. Dan juga kita tahu bahwa dinamika global ini sangat berpengaruh. Di sini saya baca masih 15.000, Pak ya, harga apa, dolar Pak ya. Padahal beberapa pekan ini sudah 16.300-16.400 per US *dollar*, ya. Itu dinamika. Ya tentu akan sangat banyak berpengaruh, perang, konflik ya, kemudian juga isu ini itu, itu akan mempengaruhi harga.

Nah, dengan asumsi ini tentu kita punya dasar apa, menghitung, menghitung dasar pijakan kita. Ujung-ujungnya Pak Menteri, ini yang ingin saya sampaikan, poin saya sebetulnya adalah kaitan semua asumsi ini dengan *national interest*. Kepentingan masyarakat *real* di bawah, bukan saja secara asumsi-asumsi makro.

Ini *kan* sebetulnya, ini ini Pak, saya ingin sampaikan, kami baru saja melakukan riset di apa, survei seluruh Indonesia, bahwa ternyata penduduk Indonesia yang berpendapatan di atas 3 juta, itu cuman 9,8% Pak, 9,8%. Dan itu, ya itulah yang ada yang sampai miliar-miliaran sampai 3 juta, di atas, itu 9,8. Dan yang sangat miris itu adalah bahwa 14,6% penduduk Indonesia masih berpendapatan Rp700.000,- per bulan. Itu surveyor yang kami bayar itu mengingat Pak *kan* Bapak, ini *money politic* sangat-sangat efektif. Karena berapa 700.000 dia makan kangkung *aja* itu Pak, enggak makan beras. Makanya kemarin kita lihat hasilnya kenapa pemilu seperti ini, waduh saya boleh sedikit cerita lah Bapak. Kita terpilih Pak, elected, tapi sedih. Apa *gitu*, kok *gini* amat ya politik ini *gitu*, main uangnya itu gila-gilaan ya. Nah jadi, ya mereka *nggak* nonton debat presiden Pak, mereka nonton apa, sinetron, ngapain mereka, *udah* enam, enam kali, 30 tahun ini pemilu tidak ada perubahan mereka *gitu*.

Jadi maksud saya asumsi-asumsi ini jangan sampai dia cuman di kalangan, ya betul sih, makroekonomi itu penting untuk *umbrella*, payung, tapi apakah itu berdampak ke bawah? Nah ini teman-teman Anggota Dewan ini tentu lebih dekat dengan masyarakat. Bagaimana mereka melihat realita di bawah, keadaan sesungguhnya. Soal LPG, minyak, tanah, dan sebagainya, dapat bensin susah, *gitu* misalnya ya. Nah, jadi *national interest* itu karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa, kecuali bangsa itu mengubah ringan tangannya sendiri, ya.

Jadi saya berharap nanti ada *legacy* ke depan Pak, disampaikan lagi bahwa ini *kan* untuk anggaran 2025 nanti ya. Tenaga kerja kita meningkat, pengangguran menurun, kesejahteraan naik ya *kan*, kemiskinan turun, begitu pendapatan naik, pembangunan kita tidak boleh berhenti, dan seterusnya dan seterusnya.

Jadi Bapak, itu harapan-harapan kami dari Fraksi PKS, bahwa terjadi sesuatu apa, peningkatan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat bawah yang saya katakan berarti ada 97% orang Indonesia ini yang berpendapatan di bawah tiga, *range* terbesar itu Pak, kita lihat 2 sampai 3 juta itu. Itu ada sekitar 48%. Memang luar biasa ya *survival* kita itu, ya.

Baik, itu mungkin sedikit Pak, izin Pak Ketua, Pak Mulyanto mau menambahkan *detailing* Pak.

Makasih, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Makasih Pimpinan, Pak Menteri, dan jajarannya.

Dari kami Fraksi PKS mengusulkan angka ICP 80 sampai 85. Karena aspek ICP ini sangat penting, kami melihat trennya naik akhir-akhir ini. Yang kedua, karena sekarang kita itu sudah menjadi negara yang net importir, jadi kenaikan harga minyak ini membuat pengeluaran kita akan semakin tinggi. Karenanya harus hati-hati mengenai angka ICP ini.

Kemudian yang terkait *lifting* minyak, kami setuju dengan teman-teman di angka 600 sampai 605 ribu. *Lifting* gas bumi juga kami setuju. Khusus *cost recovery*, ini perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari kita. Karena jangan sampai muncul logika, loh kok *lifting*-nya turun, *cost recovery*-nya malah naik, enggak masuk akal itu. Walaupun unsur di dalam *cost recovery* adalah persoalan terkait eksplorasi dan pengembangan, juga di sana ada depresiasi, namun yang utama *kan*, *cost recovery* harus berbanding lurus terhadap produksi, itu esensinya. *Cost* itu *kan* untuk produksi, yang lain-lain itu membantu produksi. Kalau produksi naik, *cost*-nya naik. Tapi kalau produksi turun, *cost*-nya naik, *nggak* masuk akal, logika dasarnya *nggak* masuk akal. Karenanya, apalagi kalau di dalamnya masih campur, adanya *gross split*, *kan gitu*. Tadi Pak ramson juga begitu *kan*, berapa persen yang *gross split*.

Mungkin ke depan usulan kami, ini *cost recovery*-nya ini berubah besarnya, bukan *cost recovery* gelondongan, tapi *cost recovery* dengan satuan US *dollar* per barel, per satuan *lifting*. *Kan* begitu, rata-rata *kan* kita per satuan *lifting*, per satuan apa, ini *cost recovery* jangan gelondongan, tapi *cost recovery* US *dollar* per barel dibagi jumlah *lifting*-nya, jadi keliatan apa, proporsionalnya. Kalau ini *kan* agak apa, ambyar ya secara matematika. Karenanya, kami mengusulkan angka *cost recovery* itu 8,0 sampai 8,5. Itu yang saya rasa lebih masuk akal, batas bawahnya kami turunkan menjadi 8,0.

Volume BBM bersubsidi, kami setuju karena APBN bukan hanya mencerminkan pengeluaran dan pendapatan kita sebagai sebuah negara, tapi mencerminkan pemihakan kita sebagai sebuah bangsa kepada masyarakatnya yang tadi pendapatannya masih minim sekali. Karena di sinilah cerminan

adanya anggaran dasar kita untuk subsidi. Karena saya sangat mendukung subsidi minyak tanah, subsidi solar yang ditingkatkan nilainya sesuai dengan usulan teman-teman. Termasuk volume gas LPG 3 kilogram, kami merasakan di lapangan masih membutuhkan ya, sehingga perlu ditingkatkan menjadi 8,2.

Namun catatan terpenting kami, jangan *sampe* apa ya, volume yang meningkat, tapi larinya kepada pengoplos. Sudah lari kepada pengoplos, terbakar, meninggal 11 orang, itu yang terjadi di Denpasar. 19 orang itu nyawa dan ini adalah puncak gunung es, bisa terjadi di mana-mana. Artinya, *nggak* bisa sistem distribusi dan pengawasan barang-barang subsidi seperti ini terus. *Kan* ini *kan* kasus yang terus berulang. Bahkan tahun ini meningkat modusnya, ada yang timbangannya berkurang, nah itu *kan* menarik itu, baru-baru ini modusnya.

Saya membaca bahwa ternyata penugasan negara dari Menteri ESDM itu memberikan penugasan ini secara tunjuk langsung kepada Pertamina. Apa yang ditugaskan? Pertama adalah penyediaannya, lalu pendistribusiannya, yang ketiga pengawasannya, saya baca di SK menterinya. Ini kan rawan, penunjukan langsung kepada sebuah lembaga mulai dari penyediaan sampai pengawasan. Kami mengusulkan pengawasannya harus ditingkatkan. Kami bahkan mengusulkan berkali-kali agar BPH Migas dilibatkan, BPH Minyak dan Gas. Sudah sekalian saja dilibatkan untuk gas LPG ini, agar semakin hari semakin baik distribusinya.

Kemudian terkait subsidi minyak solar, kami setuju juga dengan teman-teman ditingkatkan. Subsidi listrik apalagi, karena kami berharap memang betul-betul ini masyarakat, terutama di bagian timur ya Ibu Mercy, bisa menikmati listrik. Sudah hampir 78 tahun lebih kita merdeka, mudah-mudahan kita bisa meratakan listrik ini sedapat-dapatnya, kita bisa jadikan 100% ya *electricity*. Sayang PMN kemarin, PLN belum dapat ya. Kita mendorong terus ini agar betul-betul 100% rasio *electricity* ini dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya rasa itu Pimpinan, dari kami Fraksi PKS. Jadi angkanya kami setuju dengan teman-teman, untuk listrik 84 sampe 88,36.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Mulyanto.

Berikut, Fraksi Partai Amanat Nasional. Saya mewakili Fraksi PAN dalam hal ini.

Ibu-Bapak, Pak Menteri, beserta seluruh jajaran yang kami muliakan.

Ini adalah kelima kalinya kita melakukan pembahasan mengenai asumsi makro dan RKA-KL sejak tahun 2020 kemarin. Dan ini pembahasan-pembahasan ini sesungguhnya meskipun kita bicarakan ini dari tahun ke tahun, tetapi saya titip karena ini adalah masa jabatan kita untuk periode ini sebentar lagi akan berakhir. Saya titip kepada Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang ada di

hadapan kami yang mungkin banyak di antara Ibu-Bapak akan tetap meneruskan penugasannya. Saya titip PR besar kita Ibu-Bapak, dan saya titip strategi besar kita, jangan sampai kemudian itu teralihkan hanya karena hal-hal yang sifatnya kita lakukan secara reguler, secara bertahun *gitu*, secara rutinitas bertahun, setiap tahun Pak.

Satu, masalah kemandirian energi. Kita bicara kemandirian energi terus menerus, tetapi dari tahun ke tahun kita melihat bahwa itu hanya merupakan sebuah slogan saja. Kedua, kita bicara transisi energi. Kami juga menghendaki agar ke depannya ini harus ada realisasi dalam bentuk akselerasinya *gitu*. Nah transisi energi ini menurut kami sangat penting, karena kemandirian energi bisa kita capai melalui transisi energi, Ibu-Bapak. Ketiga adalah mengenai energi yang berkeadilan. Tadi kita sudah bahas teman-teman, saudara-saudara kita di Indonesia Timur juga mendapatkan haknya dalam bentuk, ya ada peningkatan dari subsidi listriknya, dari peningkatan dari kebutuhan minyak tanahnya, dan lain-lain. Tetapi kedepannya, energi yang berkeadilan ini harus dirasakan dalam bentuk ketersediaan dan harga yang terjangkau *gitu*.

Berikutnya adalah mengenai ketahanan cadangan, Ibu-Bapak, ini kami titip juga. Ketahanan cadangan ini menurut kami sangat penting, karena bagaimanapun juga kalau kita hanya berfokus kepada apa yang kita miliki saat ini dan tidak ada *recovery*, *discovery* yang baru, saya kira tidak lama lagi kita akan mengalami defisit yang lebih besar dan akan harus terpaksa menggantungkan harapan pada impor yang lebih besar lagi.

Terakhir PR yang saya titip, Ibu-Bapak yang disampaikan juga oleh rekan-rekan selama ini adalah mengenai subsidi tepat sasaran. Ini yang selalu menguras kantong kita yang sesungguhnya tidak perlu. Solusinya ada di depan mata dan saya percaya ini adalah amanah yang kami bisa titipkan dan bisa dilaksanakan oleh Ibu-Bapak sekalian. Ini mungkin pesan kami Pak, bukan bermaksud untuk retorika, tetapi ini adalah harapan besar yang kami titipkan untuk Ibu-Bapak ke depannya karena kami juga di Komisi VII selama 5 tahun ini juga ingin meninggalkan sesuatu yang akan bisa dilanjutkan oleh siapapun yang nanti akan duduk di sini maupun duduk di sana untuk bekerja sama secara produktif untuk mencapai target-target tersebut.

Khusus untuk asumsi dasar, Fraksi PAN akan setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan Partai Demokrat, termasuk PKS, tetapi kami khusus untuk *cost recovery* sama, sesuai dengan partai-partai yang lain dengan pengecualian PKS karena ada perubahan, ada perbedaan sedikit. Mungkin itu bisa kami sampaikan kepada Ibu-Bapak sekalian.

Dan selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Menteri ESDM untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atas pertanyaan dari Anggota-Anggota Komisi VII, sebelum kita kemudian lanjut kepada penetapan.

Kami persilakan, Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih.

Bapak Pimpinan beserta Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Pertama, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya pada hari lahir, hari ulang tahun kami ya. Semoga Bapak-Ibu sekalian juga mendapatkan kemudahan, kesehatan, panjang umur, serta penuh *barokah* dan sukses dalam menjalankan amanah.

Baiklah kami *respons* mengenai isu apa, topik yang tadi telah yang telah kami sampaikan dalam, dalam pembukaan. Terkait dengan ICP, ya memang kita memang menyadari bahwa kita tidak bisa mematok satu angka, karena memang bukan faktor yang bisa kita, yang ada adalah kita melakukan prediksi dengan kejadian-kejadian apa yang terjadi *globally*, terutama ini yang terkait dengan produsen-produsen minyak dunia. Tren yang ada sekarang adalah di mana *demand* menurun, justru negara produsen itu mengurangi ya, mengurangi produksinya sehingga bisa menahan harga. Dan fluktuasi harga itu bisa bervariasi antara 73 dolar sampai dengan 85 pada hari ini. Jadi angka di 80-85 Menurut kami adalah angka yang sesuai, ini juga, kita juga *me-refer* juga dengan *outlook* yang disampaikan oleh lembaga-lembaga internasional.

Kemudian yang terkait dengan *lifting* minyak dan gas bumi, yang terutama ini untuk minyak, kita memang berupaya keras untuk bisa mengangkat dan bukan hanya mengangkat, mempertahankan. Karena selama ini kita memang beroperasi pada sumur-sumur yang ada, khususnya minyak. Tetapi memang ada upaya-upaya ya, dengan adanya fleksibilitas-fleksibilitas fiskal yang kita lakukan, kemudian kemudahan-kemudahan yang kita lakukan, ada motivasi dari K3S-K3S itu untuk bisa melakukan kembali apa, upaya-upaya peningkatan ya, antara lain kita juga memperkenalkan *new gross split* ya, yang memang *memper*, yang mempermudah, mempercepat urusan perizinan dan kemudian juga memberikan dukungan terhadap insentif yang dibutuhkan. Karena *fixed gross split* itu ternyata mengunci ya, mengunci, mengunci keleluasan operasional daripada apa, K3S.

Nah, kita memang berharap bahwa ada beberapa sumber yang saat ini kita memang berharap bisa mengangkat, antara lain dari upaya untuk menurunkan *downtime*. Ya karena memang beberapa sumber kita ini *downtime*-nya, alatnya *udah* tua. Kita memang sudah minta ya pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk bisa memperbaiki, merehabilitasi sarana-sarananya ya, antara lain untuk Pertamina sehingga mengurangi *downtime*, dan tentu saja ini juga merupakan *additional cost* yang memang perlu di, perlu dipertimbangkan.

Kemudian juga upaya-upaya untuk mengoperasikan, meningkatkan kembali ya, *idle-idle wells* yang selama ini kami kembalikan ya, yang sebagai aturan dikembalikan kepada Pertamina, kami telah minta Pertamina agar, dan katanya setelah sudah meng-*issue* kepmen untuk memberikan keleluasaan

kepada Pertamina untuk bisa mengoperasikan kembali *idle-idle wells* ini dengan dilakukan sendiri maupun juga dengan bekerja sama.

Kami juga sudah melakukan tinjauan ya kepada beberapa, beberapa K3S luar negeri yang memang memiliki *experience* yang baik terkait dengan *lifting* ya, terutama mengenai *enhance oil recovery*, dan mudah-mudahan mereka dalam waktu dekat ini bisa datang, hingga tahun depan mereka bisa bekerja sama. Kemudian juga adanya potensi tambahan baru, yaitu khususnya di, di daerah *existing* ya, ini dengan diupayakannya tambahan produksi ya untuk ke sumber di Cepu dari sumber *infill* maupun dari sumber *clastic*. Ini juga antara lain untuk bisa mengerem laju penurunan ya, karena platonya *udah* terlewati, kemudian juga bisa menambah potensi ke depan ya dari, dari sumber yang *clastic* yang sudah dilakukan pengeboran dan mudah-mudahan dalam kuartal III ini ada indikasinya.

Di sektor gas, ya kita *alhamdulillah* kita ketemu sumber gas baru di Geng North ya yang besarnya mencapai 6,7, digabung dengan IDD bisa menambah 6,7 Tcf dan ini sudah kita lakukan persetujuan POD ya, sehingga memang upaya peningkatannya sudah bisa dilakukan ya, mulai dari, mulai disetujuinya POD ini dan mulai akan berlanjut sehingga 2027. Ini adalah proses yang tercepat yang memang bisa dilakukan untuk ke satu penemuan lapangan baru di wilayah Selat Makassar.

Kemudian ada lagi di wilayah *North Sumatra* ya, dengan ditemukannya potensi besar oleh Mubadalah, ini jumlahnya kurang lebih hampir mencapai 5, 5 Tcf ya kalau kita gabung. Nah, kita mengupayakan agar K3S-K3S yang ada di sana ini bergabung ya, untuk bisa, bisa bekerja sama ya dan bagaimana bisa memanfaatkan sarananya ini. Maka itu memang kita memerlukan ya tadi Pak, Pak Eddy menyampaikan pentingnya kita untuk ketahanan energi. Jadi dua kunci, yaitu adalah penemuan sumber, eksplorasi masif, dan kemudian infrastruktur kita ya. Infrastruktur ini sangat perlu di, perlu di apa, perlu didorong ya karena tadi juga kita melihat bahwa devisa untuk LPG naik terus ya, sementara sumber LPG kita itu berkurang ya, karena kita memproduksi LIN gas ya dan, dan ini memang kita bisa upayakan dengan alternatif sumber energi baru, yaitu gas yang tadi memang telah kami, telah kita upayakan.

Nah, kemudian yang terkait dengan *cost recovery*, punya angka, angka yang tadi diusulkan sebesar 8,25 sampai 8,5 miliar US *dollar*, kami, menurut hemat kami angka ini adalah angka cukup wajar. Kami akan berusaha terus untuk mengoptimalkan dan melakukan pengawasan untuk terkait dengan *spending*, *spending* dari *cost recovery*, dari biaya-biaya tersebut sehingga memang bisa ditekan semaksimal mungkin dan bisa menghasilkan tambahan-tambahan produksi sebagaimana yang kita harapkan.

Kemudian yang terkait dengan minyak solar. Minyak solar, subsidi untuk minyak solar sebesar tetap 1.000 sampai 3.000 liter. Kami memahami sekali kebutuhan di wilayah timur ya, yang kami juga tetap berusaha untuk bisa memenuhinya ya, memang harus ada pemikiran

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Izin, Ketua.

izin Pak Ketua, boleh tampilkan terus itunya.

KETUA RAPAT:

Oh iya.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

He'eh, biar kita lihat siapa yang.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terkait dengan minyak solar, ya memang harus kita upayakan ada alternatif sumber energi baru. Kami berpikir ke depannya ini untuk mengembangkan *compressed natural gas in situ* yang memang bisa diupayakan oleh pengusaha-pengusaha lokal di sana untuk bisa merespon dengan cepat ya kebutuhan-kebutuhan bahan bakar ya. Kalau mitan ini kan kita ngambilnya dari, dari kilang, dari mana, logistiknya juga mahal, padahal di wilayah timur itu masih banyak sumber gas-gas yang memang bisa dimanfaatkan. Jadi memang ini kita bisa memper apa, memperdayakan pengusaha lokal bisa mengembangkan potensi usaha di sana.

Kemudian mengenai subsidi solar, ya kami kami sepakat dengan alokasi sebesar 18,5 sampai 19 juta kiloliter, ya mengingat memang pertumbuhan ekonomi ke depan ini akan didukung antara lain oleh kebutuhan solar. Kemudian mengenai subsidi listrik, ya ini kami dengan angka, catatan angka 84 sampai dengan 88,36. Ini juga merespon, karena ini juga angka ini masih belum meng-*consider* adanya *automatic tariff adjustment* dan juga penyesuaian harga listrik. Kita masih mengetahui bahwa fluktuasi ya, fluktuasi terhadap ICP masih akan ada, demikian juga kurs ya.

Maka itu upaya-upaya untuk mengefektifkan pendistribusian, kami sangat mendukung sekali dan akan, akan kami *reinforce* timnya, terutama BPH Migas yang sudah juga melakukan upaya-upaya, dan kami juga akan mengintegrasikan ya pengawasan BBM yang selama ini menjadi domain dari BPH, ini akan kita tambah dengan pengawasan terhadap LPG, sehingga tidak lagi apa, satu ada, hanya ada satu pengawasan.

Kemudian tadi juga memang, nanti pertanyaan Pak Ramson yang selalu kritis, *kuantitatif*, analisis, nanti akan disampaikan secara tertulis ya, melengkapi ya bagaimana, berapa peran *gross split*, kemudian *cost recovery*, dan ini akan nanti disampaikan oleh, dalam lampiran laporan kita. Terima kasih.

Ya, kemudian terkait dengan pengawasan kebocoran-kebocoran di daerah yang terkait dengan minyak nonsubsidi dan kemudian pertambangan

akan kami tindak lanjuti ya, dengan unit-unit yang terkait di dalam kementerian kami.

Mungkin demikian, Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI. Kami sampaikan terima kasih tadi atas masukannya dan juga ini adalah respon kesepakatan kami untuk bisa mendukung ya, asumsi-asumsi ini agar bisa dilaksanakan dengan baik di tahun 2025.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, Pak Menteri.

Tetapi sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, saya minta izin anggota untuk bisa memperpanjang waktu sampai dengan 13.30 WIB.

Bisa disetujui? Ya.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, demikian penjelasan dari Bapak Menteri dan dalam kesempatan yang baik ini, Pimpinan meminta persetujuan kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR RI. Apakah asumsi dasar sektor ESDM tahun 2025 dapat disetujui dan dilakukan penetapan?

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Ibu-Bapak yang kami hormati.

Agenda selanjutnya, Komisi VII DPR RI akan melakukan penetapan RKA-KL Kementerian ESDM RI tahun 2025. Komisi VII DPR RI telah mendengarkan paparan dari Menteri ESDM RI terkait pagu indikatif Kementerian ESDM RI Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada tanggal 5 Juni 2024. Kemudian Komisi VII DPR RI juga telah melakukan pendalaman anggaran dalam RKA-KL Tahun Anggaran 2025 dengan seluruh jajaran Eselon I Kementerian ESDM RI pada tanggal 11 dan 13 Juni 2024.

Komisi VII DPR RI telah bersepakat dengan Sekjen Kementerian ESDM RI terkait pagu indikatif RKA-KL Kementerian ESDM RI Tahun Anggaran 2025 dengan anggaran sebesar Rp9.385.203.737.000,- dengan rincian sebagai berikut. Ini telah kami tampilkan, tidak perlu rasanya kami bacakan dan tetapi ini adalah kesepakatan RDP Komisi VII DPR RI per tanggal 13 Juni 2024.

Ibu-Bapak yang kami hormati.

37

Selanjutnya untuk efektifnya waktu, kami beri kesempatan kepada Menteri ESDM RI untuk menyampaikan kembali apabila ada tambahan penjelasan terkait Pagu Indikatif RKA-KL Kementerian ESDM tahun 2000, Tahun Anggaran 2025, sebelum kami meminta persetujuan dari Anggota dan melakukan penetapan.

Kami persilakan, Pak Menteri.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, mungkin sebelum ke Pak Menteri, catatan kaki aja Pak Ketua. Waktu itu kita sahkan itu dengan catatan, ada tambahan anggaran yang diperjuangkan di Kementerian Keuangan. Jangan sampai dilupakan, Pak.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Jadi catatan-catatan itu semua dimasukkan, Pak Ketua. Itu *aja*, sementara besarnya yang sudah disepakati.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Tolong nanti ada, ada di itu. Kalau ada, nanti masukkan kesimpulan rapat *aja*.

Kami persilakan, Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih, Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Secara keseluruhan, kami menyepakati apa yang telah disepakati di dalam RDP yang sebelumnya, jadi tidak mungkin, tidak perlu mengulas sekali lagi. Dan terkait dengan tadi tambahan dari Ibu Mercy, tadi kami sudah menindak lanjutinya dengan surat dari Sekjen atas nama Menteri ke Kementerian Keuangan untuk bisa ditindak lanjuti.

Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Baik. Ya, nanti akan, akan masukkan dalam kesimpulan ya.

Baik. Baik terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM. Selanjutnya Pimpinan meminta persetujuan kepada seluruh Anggota Komisi VII DPR RI, apakah Pagu Indikatif RKA-KL Kementerian ESDM RI Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk dilakukan penetapan?

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Ibu-Bapak yang kami hormati.

Kami bacakan draf kesimpulannya. Coba ditampilkan, silakan.

Baik, draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI, Rabu, 19 Juni 2024. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pertama, *Indonesian Crude Price*, kesepakatan pada hari ini adalah di angka 80 sampai 85 US *dollar per barrel*. *Lifting* migas, 1.603 sampai dengan 1.652 *billion oil equivalent per day*. Dalam hal ini, *lifting* minyak bumi, 600 sampai 605 barel per hari. *Lifting* gas bumi, 1.003 sampai 1.047. Kemudian *cost recovery*, 8,25 sampai 8,5 miliar dolar. Volume BBM dan LPG bersubsidi, totalnya volume BBM bersubsidi 19,05 sampai dengan 19,58 juta kl, di mana didalamnya terdapat minyak tanah sebesar 0,55 sampai dengan 0,58 juta kl dan minyak solar sebesar 18,5 sampai dengan 19 juta kl. Volume LPG 3 kilogram, 8,2 juta metrik ton. Subsidi tetap minyak solar, 1.000 sampai dengan 3.000 rupiah per liter. Dan subsidi listrik sebesar 84 sampai dengan 88,36 triliun rupiah.

Apa dapat disetujui, Ibu-Bapak? Ya.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

2. Kemudian Komisi VII DPR RI menyetujui Pagu Indikatif RKA-KL Kementerian ESDM RI Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran sebesar Rp9.385.203.737.000,-. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tahun Anggaran 2025, sebesar angka yang saya sebut tadi, baca angkanya agak panjang soalnya nih, Rp9.385.203.737.000,-. Dengan perincian sebagaimana telah kami jabarkan sebelumnya dan telah disepakati bersama.

Apa bisa disetujui, Ibu-Bapak? Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, demikian pembahasan Rapat Kerja pada hari ini. Sebelum mengakhiri rapat, kami persilakan kepada Menteri ESDM RI untuk menyampaikan sambutan penutup.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):

Ada catatan.

KETUA RAPAT:

Oh baik, mohon maaf. Nah, mohon maaf saya tadi tidak melihat catatannya.

3. Nah ini terakhir, catatannya adalah Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk segera merealisasikan program-program Kementerian ESDM RI Tahun Anggaran 2024 dan paling, paling lambat, paling lambat, tolong di itu disesuaikan, paling lambat diselesaikan pada bulan Desember 2024, khususnya untuk program yang bermanfaat langsung kepada masyarakat.

Bagaimana Pak Menteri? Setuju ya? Setuju ya? Baik.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Kemudian,

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Untuk yang sedang diketik poin keempat, mungkin langsung terkait penambahan alokasi anggaran ya. Kalau perubahan *kan* sudah dicantumkan yang di atas.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebesar. Ya, 1,49 triliun, ya, ya. 1,499 kalau *nggak* salah.

Oke. Baik saya bacakan ya.

4. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM RI terkait penambahan alokasi anggaran Kementerian ESDM RI Tahun Anggaran 2025 untuk program-program yang bermanfaat langsung kepada masyarakat sebesar Rp1,49 triliun.

Setuju Pak Menteri? Setuju ya. Baik

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan sambutan penutup.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang telah menyepakati asumsi dasar sektor ESDM untuk RAPBN tahun 2025 dan RKA-KL tahun 2025.

Kami telah memperhatikan seluruh masukan dari Ibu-Bapak sekalian selama melakukan pembahasan baik dengan kami, maupun para pejabat Kementerian ESDM, dan akan segera kami tindak lanjuti agar seluruh permasalahan yang kita bahas hari ini dapat segera kita selesaikan untuk memberikan solusi yang terbaik.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ibu-Bapak sekalian akan kami siapkan secara lebih lengkap dengan tertulis dan akan kami sampaikan.

Terima kasih.

*Billahi taufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum kami tutup rapat, Rapat Kerja hari ini, kami titip dan kami pesan kepada Pak Menteri untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan tiup lilin untuk Pak Menteri dan potong kue.

Mungkin itu bisa kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu-Bapak Anggota Komisi VII, dan dengan mengucapkan *alhamdulillah*, Rapat Kerja pada hari ini kami nyatakan ditutup.

(KETOK PALU 3 KALI)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.09 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002